

DAFTAR REFERENSI

1. Indonesia P. Undang-undang RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Jakarta: Sekretariat Negara; 2009. p. 65.
2. Hatta G. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Revisi 3. Hatta G, editor. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS); 2008. 453 p.
3. RI D. Permenkes RI 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis. Vol. 2008. Jakarta: Dirjen; 2008. p. 7.
4. Permana MH, Rumana NA. Tinjauan Proses Pelpasan Informasi Medis kepada pihak Asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017. J INOHIM. 2017;5(2):54–8.
5. Lapenia P, Masturoh I. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama. J Manaj Inf Kesehat Indones. 2019;7(2):129–36.
6. Warijan, 'Afifah MMN. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. J Rekam Medis Dan Inf Kesehat. 2019;2(1):27–33.
7. Indonesia P. Undang-undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Jakarta: Sekretariat Negara; 2004. p. 69.
8. RI D. Pedoman Penyelenggaran dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. In: Edisi II. Jakarta: Dirjen Bina Pelayanan Medik; 2006.
9. Indonesia P. Undang-undang No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran. Jakarta: Sekretariat Negara; 2012.
10. Indonesia P. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. 2014.
11. Susanto E, & Sugiharto. Manajemen Informasi Kesehatan IV: Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan. Tahun 2017. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 2017. 176 p.
12. Organization WH. Medical Records Manual: A Guide for Developing Countries. 2006.
13. Susilowati I, Surjoseputro W, Silviawati D. Perlindungan Hukum Terhadap hak Privasi dan Data Medis Pasien di Rumah Sakit X Surabaya. J Wiyata Penelit Sains dan Kesehat [Internet]. 2018;5(1):5. Available from: <http://www.ojs.iik.ac.id/index.php/wiyata/article/view/209>
14. Indonesia P. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
15. Indonesia P. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
16. Indonesia P. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara; 2009. p. 111.

17. Heri Murnawan M. Perencanaan Produktivitas Kerja dari Hasil Evaluasi Produktifitas dengan Metode Fishbone di Perusahaan Percetakan Kemasan PT.X. *J Tek Ind.* 2014;11(1):27–46.
18. Manullang M. *Dasar-Dasar Manajemen*. In Yogyakarta: Gajah Mada University Press; 2015.
19. Sari SP, dr. Zaenal Sugiyanto MK. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum dari Aspek Teori Hukum Kesehatan di RSUD Tugerejo Semarang Tahun 2013. *J Visikes.* 2013;
20. Abtelia FG, Jaka Prasetya, S.Kep MK. Tinjauan Pelaksanaan Visum Et Repertum dari Aspek Teori Hukum Kesehatan dan Prosedur Tetap di RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2015. *J Visikes.* 2015;17.
21. Istikomah FA, Erawantini F, Putra DSH. Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Untuk Pendidikan Di Rsud Sleman. *J-REMI J Rekam Med Dan Inf Kesehat.* 2020;1(4):393–9.
22. Siswati, Adinda S, Agnesia R. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Untuk Klaim Asuransi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Tahun 2018. *Medichofrdif J Rekam Medis.* 2018;5(01):25–32.
23. Natara MI, Sugiyanto Z. Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum dari Aspek Teori di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr Cipto Semarang Tahun 2014. *J Visikes.* 2014;
24. Rachman F, Sugiyanto Z. Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum Dari Aspek Teori Di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang. *J Visikes.* 2010;9(1):44–8.
25. Faida EW. Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. *J Manaj Inf Kesehat Indones.* 2016;4(2):46–51.
26. Tho I La, Purnama F. Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di Rsu Kota Tangerang Selatan. *Pros Semin Nas Rekam Medis dan Inf Kesehat.* 2019;7–16.
27. Indonesia P. *Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.* 2014;
28. Indonesia P. *Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.* Jakarta: Sekretariat Negara; 2014. p. 46.